



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/Pr.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/Pr.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/Pr.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 24 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN I:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 NOMOR 22 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MINAHASA UTARA TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025-2029

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>CARA PENGUKURAN</b>	<b>SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun sesuai SOP	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun sesuai SOP dibagi dengan Jumlah Seluruh Kegiatan KPU Minahasa Utara x 100%	Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara Ukuran Keberhasilan : Tersusunnya Surat Keputusan yang diperlukan dalam legitimasi kegiatan	JDIH KPU Minahasa Utara	Sub Bagian Teknis dan Hukum
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai	Persentase informasi mengenai partai	jumlah Publikasi informasi partai	Persen(kumulatif) Ukuran	SIPOL	Sub Bagian Teknis dan Hukum

<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>	Partai Politik yang andal dan berkualitas	politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	politik yang mutakhir dibagi dengan jumlah informasi mengenai partai politik yang mutakhir x 100 %	Keberhasilan : Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai		
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan : penilaian dengan kategori "Baik" dari indeks reformasi birokrasi KPU Minahasa Utara	Indeks Reformasi Birokrasi	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara	Hasil Evaluasi AKIP

		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total Informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai keterbukaan informasi Publik KPU Minahasa Utara	E-PPID	Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Nilai partisipasi Pemilih Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya partisipasi pemilih	Laporan Pelaksanaan Tahapan	Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM
	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Nilai partisipasi Pemilih Perempuan Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya partisipasi pemilih Perempuan	Laporan Pelaksanaan Tahapan	Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Nilai partisipasi Pemilih Disabilitas Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya	Laporan Pelaksanaan Tahapan	Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM

	<p>Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>			<p>partisipasi pemilih disabilitas</p>		
		<p>Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p>	<p>Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p>	<p>Nilai partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Ukuran Keberhasilan : menurunnya jumlah yang Berhak Memilih Tetapi</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Tahapan</p>	<p>Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM</p>

				Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap		
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	jumlah penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan berlaku dibagi jumlah KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan x 100 %	Persen(kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Minahasa Utara sesuai jadwal dan ketentuan berlaku	Laporan Pelaksanaan Tahapan	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan dan logistik, Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM serta Sub Bagian Teknis dan Hukum
<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan, Adil</b>	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	<u>Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai Jumlah total KPU Kota yang menyelenggarakan x 100% Pemilu</u>	Persen(kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota yang berlangsung secara aman dan damai	Laporan Pelaksanaan Tahapan	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan dan logistik, Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM serta Sub Bagian Teknis dan Hukum

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Minahasa Utara	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan Jumlah total sengketa hukum KPU Kota x 100 %	Persen(kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Laporan Sengketa Hukum	Sub Bagian Hukum
--	--	---	--	--	------------------------	------------------

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 NOMOR 22 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MINAHASA UTARA TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2025-2029

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>CARA PENGUKURAN</b>	<b>SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan Ukuran Keberhasilan : Hasil Riset	Laporan Riset	Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian	jumlah pegawai KPU Minahasa Utara dibagi dengan jumlah penugasan x 100 %	"Persen(kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya"	Daftar Nominatif Pegawai	Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM

		kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya				
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Minahasa Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara	Hasil Evaluasi AKIP	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	
	kebutuhan kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah total Informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai keterbukaan informasi Publik KPU Minahasa Utara	E-PPID	Sub Bagian Hubungan Partisipasi masyarakat dan SDM	

<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Minahasa Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Minahasa Utara	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi (nominal) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Minahasa Utara	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi"	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi"
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Minahasa Utara				

<p>Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan</p> <p>Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu</p>	<p>Persentase KPU Minahasa Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu</p> <p>Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p>	<p><u>Jumlah data yang dimutakhirkan tepat waktu</u> X 100</p> <p>Jumlah Total KPU</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase pemutakhiran data Pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>Dokumen Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih dan SIDALIH</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>
<p>Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Minahasa Utara yang efektif dan efisien</p>	<p>Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan</p>	<p>Jumlah total revisi</p>	<p>Jumlah revisi (nominal) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah revisi rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>DIPA, RKAKL</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>

<p>Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien</p>	<p>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</p>	<p><u>Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu</u> x100% Jumlah total Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>E-Monev Bappenas</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>
	<p>Persentase target kinerja KPU Minahasa Utara yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja</p>	<p><u>Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu</u> x100% Jumlah total target kinerja</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>Perjanjian Kinerja, LKJIP</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>
<p>Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Minahasa Utara dan KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase KPU Minahasa Utara dengan nilai minimal B untuk</p>				

	penilaian mandiri RB				
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	<u>Jumlah pegawai yang mendapat layanan</u> x100% kepegawaian tepat waktu Jumlah total pegawai	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah /persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Aplikasi Pelayanan Kepegawaian untuk PNS : SIMPEG, MySAPK dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara SIASN serta Dokumen Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Utara	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	<u>Jumlah pegawai yang disiplin</u> x100% Jumlah total pegawai	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan Penegakan Disiplin Pegawai	Dokumen terkait Penegakan Disiplin Pegawai	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang	<u>Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-</u>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang	SIMPEG	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan

	diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	<u>Undangan</u> x100% Jumlah total pegawai	diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan		Sumber Daya Manusia
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Minahasa Utara dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Minahasa Utara yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	<u>Jumlah Anggota KPU Minahasa Utara yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan</u> x100% Jumlah total Anggota KPU Minahasa Utara yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	SIMPEG	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis	<u>Jumlah Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi</u> x100% Jumlah total Pegawai	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah /persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam database	Aplikasi Pelayanan Kepegawaian untuk PNS : SIMPEG, MySAPK dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara SIASN serta Dokumen Usulan Jabatan	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

	teknologi informasi	yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pelaksana di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Utara	
	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	<u>Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian</u> x100% Jumlah total Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah /persentase Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	SIMPEG	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Tersedianya Jabatan Fungsional Tata Kelola	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola	<u>Jumlah Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola</u> x100% Jumlah total Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah /persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola	SIMPEG	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Pemilu ( JF PKP )	<u>Jumlah Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku</u> x100% Jumlah total Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	SIMPEG	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

		sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku			
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	<u>Jumlah badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi</u> x100% Jumlah total badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	SIAKBA	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan</u> x100% Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	LRA, Capaian Output, LPJ Bendahara dan SPP dan SPM	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh	<u>Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Minahasa Utara</u> x100%	Jumlah laporan (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang	Laporan Keuangan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

waktu oleh KPU Minahasa Utara	KPU Minahasa Utara	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Minahasa Utara	diselesaikan tepat waktu oleh KPU Minahasa Utara		
Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Jumlah total Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid	Jumlah (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	LPPA	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Minahasa Utara sesuai dengan peraturan perundang-	<u>Jumlah barang milik negara yang dapat dikelola</u> x100% Barang Milik Negara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Laporan BMN dan Stock Opname Persediaan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

	undangan yang berlaku				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara tentang kearsipan yang telah disusun	<u>Jumlah rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara tentang kearsipan yang telah disusun</u> x100% Jumlah total arsip	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase "Jumlah rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara tentang kearsipan yang telah disusun	Retensi Arsip	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Meningkatnya kualitas arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Minahasa Utara	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Minahasa Utara</u> x100% Jumlah total arsip	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Minahasa Utara	SRIKANDI	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik</u> x100% Jumlah total sarana transportasi untuk	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik	Laporan BMN	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

	yang berfungsi dengan baik	mendukung kinerja KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik			
Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Minahasa Utara	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik	<u>Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik</u> x100% Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik	Laporan BMN	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik	<u>Jumlah Gedung dan Gudang KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik</u> x100% Jumlah total Gedung dan Gudang KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Gedung dan Gudang KPU Minahasa Utara yang berfungsi dengan baik	LAPORAN BMN	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi / Dokumentasi Rapat Pleno rutin	<u>Jumlah hasil notulensi atau dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling</u>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase hasil	Berita Acara Rapat Pleno Rutin dan Notulensi	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

	yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Minahasa Utara	<u>lambat 2 hari kerja</u> x100% Jumlah total hasil rapat pleno	notulensi/dokumentasi yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 hari kerja		
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Minahasa Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Minahasa Utara yang dapat ditanggulangi	<u>Jumlah gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Minut</u> x100% Jumlah total gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya keamanan dalam lingkungan KPU Minahasa Utara	Laporan Jagasakasana	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	<u>Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan internal dilingkungan KPU Minut</u> x100% Jumlah Realisasi Anggaran	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Menurunnya nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal dalam lingkungan KPU Minahasa Utara	LRA, Capaian Output, LPJ Bendahara dan SPP dan SPM	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	Persentase KPU Minahasa Utara yang mengisi dan	<u>Jumlah kartu kendali SPIP yang disusun dilingkungan KPU</u>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase	LAPORAN SPIP	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

		menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	<u>Minut x100%</u> Jumlah total Kartu kendali SPIP	kartu kendali SPIP yang disusun dilingkungan KPU Minahasa Utara		
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP		Persentase capaian kelengkapan unsur kartu kendali KPU Minahasa Utara dan Kabupaten/Kota	<u>Jumlah kartu kendali SPIP yang disusun dilingkungan KPU</u> <u>Minut x100%</u> Jumlah total Kartu kendali SPIP	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase kartu kendali SPIP yang disusun dilingkungan KPU Minahasa Utara	SPIP	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Jumlah dokumen Penilaian Risiko (Risk Assesment) level entitas dan aktivitas	<u>Jumlah dokumen penilaian risiko dilingkungan KPU</u> <u>Minut x100%</u> Jumlah total dokumen penilaian risiko	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase dokumen penilaian risiko dilingkungan KPU Minahasa Utara	RISK REGISTER	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Jumlah penyampaian laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu	<u>Jumlah penyampaian laporan semesteran dan tahunan SPIP</u> x100% Jumlah total laporan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase laporan semesteran dan tahunan SPIP dilingkungan KPU Minahasa Utara	LAPORAN SPIP	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

			semesteran dan tahunan SPIP			
		<p>Nilai maturitas SPIP KPU Minahasa Utara berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Satker dan/atau Penjaminan Kualitas (PK) dari APIP</p>	<p><u>Jumlah nilai maturitas SPIP</u> x100%</p> <p>Jumlah total nilai maturitas SPIP</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase nilai maturitas SPIP dilingkungan KPU Minahasa Utara</p>	E-SPIP	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>
	<p>Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal</p>	<p>Prosentase rapat pembahasan kartu kendali SPIP yang dilaksanakan dalam 1 tahun</p>	<p><u>Jumlah rapat pembahasan kartu kendali SPIP</u> x100%</p> <p>Jumlah total rapat pembahasan kartu kendali SPIP</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase jumlah rapat pembahasan kartu kendali SPIP dilingkungan KPU Minahasa Utara</p>	RAPAT SPIP	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>
		<p>Prosentase anggota KPU Minahasa Utara yang patuh terhadap kode</p>	<p><u>Jumlah anggota KPU Minahasa Utara yang patuh terhadap kode perilaku dan kode etik</u> x100%</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase jumlah anggota KPU Minahasa Utara yang patuh</p>	SIKUM	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>

	perilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik oleh DKPP)	Jumlah total anggota KPU Minahasa Utara	terhadap kode perilaku dan kode etik dilingkungan KPU Minahasa Utara		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</u> x100% Jumlah total pengaduan masyarakat	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dilingkungan KPU Minahasa Utara	PPID	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Minahasa Utara	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti</u> x100% Jumlah total penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dilingkungan KPU Minahasa Utara	MATRIKS TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Minahasa Utara</p>	<p>Persentase KPU Minahasa Utara dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B</p>	<p><u>Jumlah nilai akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara</u> x100%</p> <p>Jumlah total nilai akuntabilitas</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi</p>
<p>Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Minahasa Utara</p>	<p>Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p><u>Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</u> x100%</p> <p>Jumlah total unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Minahasa Utara</p>	<p>Laporan Zona Integritas</p>	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>
<p>Peningkatan kompetensi SDM KPU Minahasa Utara</p>	<p>Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan</p>	<p><u>Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka</u></p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya pembangunan Zona</p>	<p>SIMPEG</p>	<p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan</p>

		Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	<u>peningkatan kompetensi SDM</u> x 100% Jumlah total pegawai di lingkungan KPU Minahasa Utara	Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Minahasa Utara		Sumber Daya Manusia
			<u>Jumlah pegawai yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya sesuai jadwal</u> x 100% Jumlah total pegawai di lingkungan KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah pegawai yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya sesuai jadwal di lingkungan KPU Minahasa Utara	SIMPEG	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	<u>Jumlah kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi</u> x 100% Jumlah total kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan KPU Minahasa Utara	RISET KEPEMILUAN	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Riset	<u>Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan</u>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan :	RISET KEPEMILUAN	Sub Bagian Partisipasi,

<b>Mewujudkan pemilu serentak Yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil</b>		dan Jurnal Kepemiluan	x 100% Jumlah total dokumen riset dan jurnal kepemiluan di lingkungan KPU Minahasa Utara	Meningkatnya jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan di lingkungan KPU Minahasa Utara		Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.		<u>Jumlah rancangan keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU x 100%</u> Jumlah total rancangan keputusan KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU di lingkungan KPU Minahasa Utara	JDIH	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase KPU Minahasa Utara menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah,	<u>Jumlah KPU Minahasa Utara menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu x</u>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kualitas logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan	KPT NOMOR 1395 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

	tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100% Jumlah total logistik Pemilu/Pemilihan di TPS	tepat waktu di lingkungan KPU Minahasa Utara		
Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraa n Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	<u>Jumlah Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal</u> x 100% Jumlah total penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal di lingkungan KPU Minahasa Utara	SILON	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Tersusunnya Keputusan KPU Minahasa Utara dan Keputusan KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase KPU Minahasa Utara yang memiliki SOP Penyusunan Keputusan	<u>Jumlah SOP Penyusunan Keputusan</u> x 100% Jumlah total SOP Penyusunan Keputusan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kualitas SOP Penyusunan Keputusan di lingkungan KPU Minahasa Utara	SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN NOMOR 5 TAHUN 2024	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Persentase Rancangan Keputusan disusun tepat waktu dan sesuai dengan SOP	<u>Jumlah rancangan keputusan disusun tepat waktu dan sesuai SOP</u> x 100% Jumlah total SOP Penyusunan Keputusan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Jumlah rancangan keputusan disusun tepat waktu dan	SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN NOMOR 5 TAHUN 2024	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

			sesuai SOP di lingkungan KPU Minahasa Utara		
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Minahasa Utara memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	<u>Jumlah SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH</u> x 100% Jumlah total SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah pengunggahan produk hukum ke JDIH di lingkungan KPU Minahasa Utara	JDIH	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Persentase Keputusan KPU Minahasa Utara diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP	<u>Jumlah Keputusan KPU Minahasa Utara diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP</u> x 100% Jumlah total SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Keputusan KPU Minahasa Utara diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP di lingkungan KPU Minahasa Utara	JDIH	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Persentase KPU Minahasa Utara mengupload berita hukum pada laman JDIH KPU Minahasa Utara (per bulan	<u>Jumlah SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH</u> x 100% Jumlah total SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah pengunggahan produk hukum ke JDIH di lingkungan KPU Minahasa Utara	JDIH	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

	minimal 4 konten)				
	Persentase KPU Minahasa Utara memiliki SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH	<u>Jumlah SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH</u> x 100% Jumlah total SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah SOP Pengunggahan Informasi Produk Hukum ke Media Sosial JDIH di lingkungan KPU Minahasa Utara	INSTAGRAM JDIH KPU MINAHASA UTARA	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Persentase KPU Minahasa Utara memiliki nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH (per bulan minimal 5 postingan)	<u>Jumlah nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH</u> x 100% Jumlah total postingan pada akun medsos JDIH	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai rata-rata postingan pada akun medsos JDIH di lingkungan KPU Minahasa Utara	INSTAGRAM JDIH KPU MINAHASA UTARA	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase KPU Minahasa Utara melaksanakan Pemilu maupun Pemilukada tanpa sengketa	<u>Jumlah sengketa hukum baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK</u> x 100% Jumlah total sengketa hukum baik di	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase KPU Minahasa Utara melaksanakan Pemilu maupun Pemilukada tanpa	SIKUM	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

	hukum (nol perkara) baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK	Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK	sengketa hukum (nol perkara) baik di Bawaslu, PTUN, PN dan PT, KIP dan MK di lingkungan KPU Minahasa Utara		
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Minahasa Utara</u> x 100% Jumlah total sengketa hukum yang dimenangkan KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya sengketa hukum yang dimenangkan KPU Minahasa Utara	PUTUSAN SENGKETA PILKADA	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Terwujudnya Penyelenggaraan	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Minahasa Utara</u> x 100% Jumlah total penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase KPU Minahasa Utara melaksanakan penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	PKPU	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

		Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Minahasa Utara			
Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Minahasa Utara memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2029	<u>Jumlah data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan yang dipetakan untuk Pemilu Tahun 2029 KPU Minahasa Utara</u> x 100% Jumlah total data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan yang dipetakan untuk Pemilu Tahun 2029 KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase KPU Minahasa Utara memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2029	SIDAPIL	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Minahasa Utara yang dapat	<u>Jumlah PAW anggota DPRD Minahasa Utara yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</u> x 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya persentase PAW anggota DPRD Minahasa Utara yang dapat	SILON	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

	diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Jumlah total PAW anggota DPRD Minahasa Utara yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		
Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	<u>Jumlah calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi</u> x 100% Jumlah total calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	SILON	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	<u>Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU</u> x 100% Jumlah total Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu / Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	PKPU	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

<p>Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan</p>	<p>Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan</p>	<p><u>Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu x 100%</u> Jumlah total dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan</p>	<p>INSTAGRAM JDIH KPU MINAHASA UTARA</p>	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>
	<p>Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan</p>	<p><u>Jumlah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Minahasa Utara x 100%</u></p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Minahasa Utara</p>	<p>SIPOL</p>	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>

	KPU Minahasa Utara	Jumlah total data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Minahasa Utara			
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Minahasa Utara	<u>Jumlah Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Minahasa Utara</u> x 100% Jumlah total Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Minahasa Utara	LAPORAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	<u>Jumlah Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Minahasa Utara</u> x 100% Jumlah total Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Minahasa Utara	PERPUSTAKAAN KPU MINUT	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

<p>Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum</p>	<p>Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Minahasa Utara</p>	<p><u>Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh di KPU Minahasa Utara</u> x 100%</p> <p>Jumlah total kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Minahasa Utara</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Minahasa Utara</p>	<p>LAPORAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU</p>	<p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>
<p>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p>	<p>Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>	<p><u>Jumlah Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Minahasa Utara</u> x 100%</p> <p>Jumlah total Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP oleh KPU Minahasa Utara</p>	<p>PPID</p>	<p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

		dengan SOP oleh KPU Minahasa Utara			
	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Minahasa Utara serta media massa.	<u>Jumlah informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial di KPU Minahasa Utara x 100%</u> Jumlah total informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial oleh KPU Minahasa Utara	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial oleh KPU Minahasa Utara	MEDIA SOSIAL KPU MINUT	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Persentase KPU Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam	<u>Jumlah KPU Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan</u>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya KPU Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran	KPT NOMOR 1395 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

		pemenuhan kebutuhan logistik	<u>logistik</u> x 100% Jumlah total KPU Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	dalam pemenuhan kebutuhan logistik		
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Minahasa Utara yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	<u>Jumlah KPU Minahasa Utara yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara</u> x 100% Jumlah total KPU Minahasa Utara yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian	KPT NOMOR 1395 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

			dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	negara atau pemborosan uang Negara KPU Minahasa Utara		
		Persentase KPU Minahasa Utara yang mendistribusian logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	<u>Jumlah KPU Minahasa Utara yang mendistribusian logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu x 100%</u> Jumlah total KPU Minahasa Utara yang mendistribusian logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya distribusi logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu KPU Minahasa Utara	KPT NOMOR 1395 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Persentase KPU Minahasa Utara yang memelihara dan	<u>Jumlah KPU Minahasa Utara yang memelihara dan menginventarisir logistik</u>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya KPU Minahasa Utara yang	KPT NOMOR 1395 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

		<p>menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p><u>Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</u> x 100%</p> <p>Jumlah total KPU Minahasa Utara yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>		
		<p>Persentase KPU Minahasa Utara yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu</p>	<p>Jumlah KPU Minahasa Utara yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu x 100%</p> <p>Jumlah total KPU Minahasa Utara yang melakukan</p>	<p>Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu oleh KPU Minahasa Utara</p>	<p>LAPORAN TATA KELOLA LOGISIK PEMILU TAHUN 2024</p>	<p>Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik</p>

			penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu			
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	<u>Jumlah penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu x 100%</u> Jumlah total penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu oleh KPU Minahasa Utara	A.PUNG	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	<u>Jumlah pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan x 100%</u> Jumlah total pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Minahasa Utara	SIDALIH	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

		<p>Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p>	<p><u>Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</u> x 100%</p> <p>Jumlah total Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p>	<p>Persen (kumulatif)</p> <p>Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar oleh KPU Minahasa Utara</p>	<p>Dokumen Screenshoot Webiste dan Medsos</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>
		<p>Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Minahasa Utara</p>	<p><u>Jumlah Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Minahasa Utara</u> x 100%</p> <p>Jumlah total Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Minahasa Utara</p>	<p>Persen (kumulatif)</p> <p>Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Minahasa Utara oleh KPU Minahasa Utara</p>	<p>Dokumen Screenshoot Aplikasi Emonev,Sakti,Siakba,SIPO L,SIDALIH,SIREKAP</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>